

*RENCANA KERJA (RENJA) OPD
TAHUN 2018*



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	6
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD	7
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	8
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	9
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	10
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD	12
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	14
BAB 1V PENUTUP	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ke Satu dari Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renstra –OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 – 2021, dengan Mempedomani Rancangan Awal RKPD tahun 2016, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2025. Renja OPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2016-2021 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja OPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan OPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program OPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra OPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) OPD dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pada tahun 2018 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan OPD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang ditetapkan. Dalam hal ini dilakukan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Renstra pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang dan program program kegiatan yang diajukan oleh setiap bidang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor (1308)
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/ Kota.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Dharmasraya Nomor 64).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 adalah untuk menetapkan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Diskominfo dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 adalah untuk :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018.
- Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan kepada Diskominfo sesuai aturan yang berlaku.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Fungsi OPD Identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2017

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017

Pengukuran pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan mengacu kepada penetapan Renstra Tahun 2016-2021 yang pada saat ini mengacu kepada RKPD 2005-2025 Kabupaten Dharmasraya. Capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok: masukan (input), proses (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan Organisasi pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk orang, buah, hari, persen dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Dharmasraya Tahun 2016 - 2021 yang mengacu kepada RPJP 2005 - 2025, Visi Misi dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016, dituangkan dalam Evaluasi Renja 2016 Untuk Memperbandingkan Capaian Target yang dicapai dalam RPJP 2005-2025 Capaian Renstra 2016-2021. Hasil pengukuran evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Uraian/Detail Uraian Pemenuhan Dasar Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (tahun Periode RPJMD) 2011		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPJMD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2016 yang Direvisi		REALISASI KINERJA PADA TAHUNAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direvisi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD di Tahun 2016 (tahun Perencanaan RPJMD Tahun 2011-2012)	
		a		b		c		d		e		f		g		h			
		x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y		
Dinas KOMINFO																			
Program pengembangan																			
perbaikan website berbasis database	tercipta/nya website di dharmasraya	-	-	-	-	63.884.000	-	514.000	-	4.311.500	-	40.296.000	-	18.080.800	-	63.313.300	-	63.313.300	
monitoring evaluasi dan perbaikan sarana dan prasarana komunikasi	terdapatnya sarana komunikasi di dharmasraya	-	-	42.775.000	-	514.000	-	3.311.500	-	10.396.000	-	17.971.200	-	42.102.700	-	42.102.700	-	42.102.700	
program peningkatan	-	-	-	95.118.000	-	8.487.500	-	38.289.000	-	13.740.000	-	30.584.500	-	90.871.000	-	90.871.000	-	90.871.000	
peningkatan kemampuan database dalam informasi	terlaksananya pelayanan dan penyediaan data dengan tingkat profesionalitas	-	-	42.640.000	-	4.400.000	-	13.320.000	-	10.440.000	-	14.030.000	-	41.190.000	-	41.190.000	-	41.190.000	
pengadaan alat pengisian masa	terlaksananya alat pengisian masa	-	-	16.230.000	-	2.200.000	-	5.410.000	-	3.300.000	-	5.585.000	-	14.475.000	-	14.475.000	-	14.475.000	
soal/isi pembentukan layanan informasi masyarakat	-	-	-	36.228.000	-	1.847.500	-	22.559.000	-	10.799.500	-	10.799.500	-	35.206.000	-	35.206.000	-	35.206.000	
				159.000.000	-	8.961.500	-	42.420.500	-	34.036.000	-	48.475.300	-	154.083.300	-	154.083.300	-	154.083.300	
								Rata-rata Capaian Kinerja (%)						91%					

Pada tahun 2016 Program kegiatan dalam mewujudkan ketersediaan website di Dharmasraya beserta terdatanya jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Dharmasraya terealisasi sebesar Rp. 63.212.350,- dari target anggaran 63.884.600,-

Sedangkan dalam pelaksanaan pelayanan silver dan entry data dalam rangka pengoperasionalan website beserta pelaksanaan sms gateway pengaduan masyarakat dari target anggaran Rp.95.118.400,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 90.871.000,-

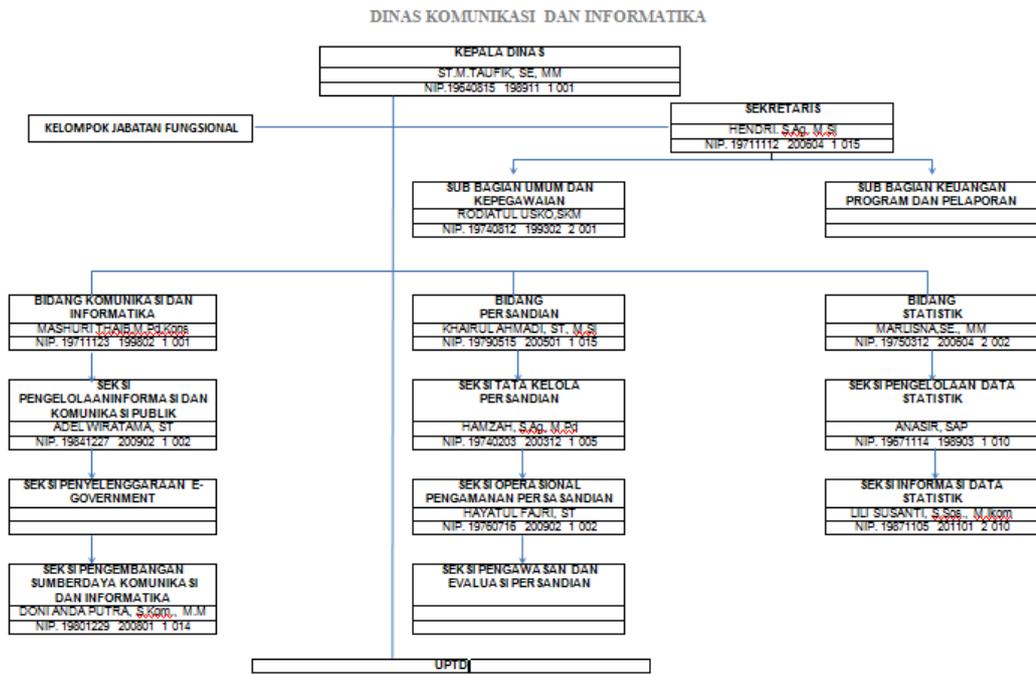
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa urusan yang menjadi urusan pemerintahan daerah diantaranya adalah urusan bidang persandian, dan urusan bidang statistik.

Kemudian di tahun 2016, mengingat urusan persandian dan statistik belum menjadi tupoksi di Dinas Kominfo dengan demikian, belum terdapat kegiatan pada kedua bidang tersebut, dua bidang itu baru berlaku setelah ditetapkannya OPD baru sesuai dengan Perda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi dan Informatika, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandiaan.

Penataan kelembagaan dan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64) dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Jabatan, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Masih banyak daerah-daerah yang terisolir/blank spot serta belum mendapatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi terutama pada sentra-sentra perekonomian yang ada di Kabupaten Dharmasraya;
2. Belum tersedianya Grand Design (Master Plan) TIK Kabupaten Dharmasraya untuk pembangunan dan pengembangan TIK di Kabupaten Dharmasraya dikarenakan keterbatasan anggaran.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang baik secara kualitas dan kuantitas
4. Belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi e-Government, sulitnya koordinasi kelembagaan, dan belum adanya aplikasi perencanaan berdasarkan penilaian berkala.
5. Belum adanya kegiatan di bidang persandian karena bidang itu baru berlaku setelah ditetapkannya OPD baru.
6. Belum adanya kegiatan di bidang statistik karena bidang itu baru berlaku setelah ditetapkannya OPD baru.

Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya produk perencanaan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan serta memperhatikan masukan atau saran dari masyarakat, baik disampaikan secara langsung melalui Musrenbang, maupun secara tertulis.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2014-2019, maka Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut :

"Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI"

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas yaitu:

- 1) *Terwujudnya Indonesia Informatif*, adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- 2) *Masyarakat sejahtera*, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai

keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani.

- 3) *Pembangunan kominfo berkelanjutan*, adalah pembangunan komunikasi dan informatika yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna.
- 4) *Pembangunan kominfo yang merakyat* adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.
- 5) *Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan* adalah penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan.
- 6) *NKRI*, yaitu Negara KeOrganisasi Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Sementara rumusan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI;
2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;
3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa;
4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan;

Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

Tahun 2018 merupakan tahun kedua masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya dalam mencapai visi jangka menengah 2016 -2021 yaitu :

“Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya ”

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Dharmasraya.

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2016–2021 telah ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2018 khususnya di bidang pemerintahan yaitu :

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah
2. Membangun berbasis nagari
3. Membangkitkan identitas daerah
4. Memeratakan insfrastruktur
5. Mewujudkan pendidikan yang berkarakter
6. Meningkatkan derajat kesehatan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi
8. Membangun dengan semangat berkelanjutan (mewujudkan sustainable development)

Secara khusus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan kontribusi melalui penyediaan infrastruktur bidang Komunikasi, informatika, Statistik, dan Persandian.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Dharmasraya mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kominfo, maka Tujuan dan sasaran Renja kominfo tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan	Sasaran
Pelayanan keterbukaan informasi;	Meningkatnya akses layanan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
Terselenggaranya statistic sektoral; dan	1. Ketersediaan statistik sektoral dan elemen data. 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.
Peningkatan pengamanan informasi daerah	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah.

3.2.1 Sasaran dan Arah Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kebijakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi diarahkan bagi peningkatan mutu pelayanan timbal balik dan arus informasi kepada dan dari masyarakat. Tujuannya untuk mendukung sosialisasi dan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Kebijakan untuk mencapai sasaran adalah:

1. Menciptakan sistem penyediaan menyeluruh, terpadu dan kompetitif serta menyahuti keinginan masyarakat terhadap telekomunikasi dan informasi.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi.
3. Mengendalikan sistem telekomunikasi dan informasi terhadap masyarakat.
4. Memprioritaskan pembebasan lahan dan memudahkan perizinan dalam pembangunan dan pengembangan prasarana telekomunikasi dan informasi.
5. Menyusun kesepakatan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan prasarana telekomunikasi dan informasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2018 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya 2016 – 2021. Dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat 7 program yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2018 yaitu :

Bagian sekretariat

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kanto
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
12. Penyediaan jasa pelayanan keamanan kantor

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan operasional kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan perlengkapan kantor
4. Pengadaan meubeuler
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralengkapan kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8. Pemeliharaan rutin gedung kantor

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan non formal

D. Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan

Capaian Kinerja dan keuangan

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan
2. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan SKP

Bidang Kominfo

A. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Media Massa

1. Fasilitas Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran dan KMIP
2. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
3. Lanjutan Pembangunan jaringan antar OPD
4. Pemeliharaan Jaringan Antar OPD

B. Program E-Government

1. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
2. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi/ E-Government

C. Program Fasilitas Peningkatan SDM di bidang Komunikasi dan Informatika

1. Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
2. Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat
3. Pembinaan anggota ORARI dan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
4. Sosialisasi Internet Sehat

D. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa

1. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Sarana dan Prasarana
2. Pengembangan layanan media center

E. Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Berbasis TI

1. Pengembangan/ Peningkatan Kemampuan Data Base Sistem Informasi
2. Pembangunan Sistem Informasi Daerah
3. Pengembangan jaringan dan layanan Media Center
4. Pengadaan jaringan WiFi gratis untuk masyarakat
5. Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat

F. Program Pengendalian Jasa Usaha POS dan Telekomunikasi

1. Pengendalian Tertib Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi

G. Program Komunikasi Publik

1. Program Monitoring dan Evaluasi KPU-USO
2. Sosialisasi dan diseminisasi informasi
3. Pemilihan media tradisional terbaik
4. Literasi Informasi Media komunikasi
5. Pekan Informasi Daerah

Bidang Statistik

A. Program Pengembangan Statistik Sektoral

1. Survey gender dan anak
2. Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
3. Penyusunan Gini rasio daerah
4. Penghitungan increamental capital output ratio (ICOR) dan Investasi
5. Penghitungan Nilai tukar petani
6. Penyusunanana analisis tabel Input-Output (IO)

B. Program pengembangan data/ Informasi/statistik daerah

1. Komplikasi Produk Administrasi Bidang Sosial
2. Cetak Buku Saku Statistik Daerah
3. Sosialisasi Statistik Daerah
4. Sistem Informasi data daerah

C. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Belanja Sekretariat PPID
2. Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya
3. Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya

Bidang persandian**A. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

1. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah
2. Pengelolaan peralatan sandi dan jaring komunikasi sandi yang digunakan pemerintah daerah
3. Penyediaan alat pendukung utama persandian yang digunakan pemerintah daerah
4. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian pada setiap perangkat daerah
5. Koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah
6. Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
7. Pengembangan sistem pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah
8. Penyediaan Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah
9. Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka milik pemerintah dan yang dikecualikan milik pemerintah

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan OPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis OPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan OPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2017, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin.

Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala yang terjadi, maka strategi pemecahan masalah yang digunakan di masa yang akan datang adalah:

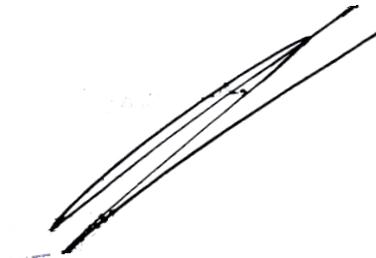
- 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dengan segala keterbatasannya serta sarana lain yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 2) Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat selain sosialisasi dan publikasi hasil pembangunan serta kebijakan Pemerintah Kabupaten bahwa pentingnya memiliki ijin-ijin, agar terwujudnya ketertiban umum, baik administrasi maupun non administrasi
- 3) Melakukan pengawasan di lapangan serta mengadakan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat termasuk sekolah-sekolah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- 4) Mengoptimalkan tenaga teknis yang terampil di berbagai bidang multimedia Di samping itu untuk meminimalkan kendala yang dihadapi maka jalan yang akan ditempuh antara lain:
 - a) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien
 - b) Menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal kegiatan secara tepat

- c) Secara bertahap mengadakan penyempurnaan strategi melaksanakan kegiatan
- d) Menyempurnakan penyusunan anggaran agar teralokasi secara baik
- e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lebih intensif.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Sikabau, Mei 2017

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
KABUPATEN DHARMASRAYA**



H. ST. M. TAUFIK, SE, MM.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19640815 198911 1 001

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	12	
1	Urusan Wajib Non Pelayanan								
1 02	Sekretariat								
1 25 07 15	Program Pelayanan Administrasi perkantoran								
1 25 7 15 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat legalitas surat menyurat yang dibayarkan	Sub.bag Umum dan Kepeg	100 Lembar	2.700.000	APBD		350 Lembar 2.700.000	
1 25 07 15 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah line internet	Sub.bag Umum dan Kepeg	4 line internet	80.000.000	APBD		4 line internet 80.000.000	
		Jumlah rekening listrik		1 rekening listrik				1 rekening listrik	
		Jumlah line telepon		1 line telepon				1 line telepon	
1 25 07 15 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendraan Roda 4 yang diperbaharui	Sub.bag Umum dan Kepeg	3 unit	2.800.000	APBD		7 unit 3.000.000	
		Jumlah STNK Kendraan Roda 4 yang diperbaharui		4 unit				2 unit	
1 25 07 17 04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Petugas Kebersihan yang dibiayai	Sub.bag Umum dan Kepeg	2 orang	31.680.000	APBD		2 orang 31.680.000	
	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah Jasa Petugas Sopir yang dibiayai	Sub.bag Umum dan Kepeg	1 orang	16.000.000	APBD		1 orang 16.000.000	
1 25 07 17 05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang	Sub.bag Umum dan Kepeg	70 Jenis	40.000.000	APBD		70 Jenis 40.000.000	
1 25 07 17 06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Penggandaan yg tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	10 Jenis	35.000.000	APBD		10 Jenis 35.000.000	
		Jumlah Penggandaan yang tersedia		100000 Penggandaan				100000 Penggandaan	
1 25 07 17 07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tanggungan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bagunan kantor	Sub.bag Umum dan Kepeg	15 Komponen	10.000.000	APBD		15 Komponen 10.000.000	
1 25 07 17 08	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah jamuan makan Rapat staf	Sub.bag Umum dan Kepeg	24 kali	27.500.000	APBD		24 kali 27.500.000	
		Jumlah Jamuan Makan Rapat Koordinasi		24 kali				24 kali	
		Jumlah jamuan makan rapat tamu		24 kali				24 kali	

1	25	07	17	09	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar daerah	Sub.bag Umum dan Kepeg	120 kali	240.000.000	APBD		120 kali	240.000.000
						Jumlah Kordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Sub.bag Umum dan Kepeg	120 kali				120 kali	
1	25	07	17	10	Penyediaan bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	800 Eksemplar	16.000.000	APBD		800 Eksemplar	16.000.000
1	25	07	17	11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	2 Orang (12 bulan)	31.680.000	APBD		2 Orang (12 bulan)	31.680.000
1	25	07	17	12	Penyediaan jasa pelayanan keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan Kantor dan Jumlah Alat pengaman Kantor yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	1 orang	21.000.000	APBD		1 orang	21.000.000
1	25	07	18		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	25	07	18	01	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Kendaraan Roda 4 (empat) yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	1 unit	430.000.000	APBD		1 unit	430.000.000
						Jumlah Kendaraan Roda 2 (dua) yang tersedia		4 unit			Tidak ada satupun kendaraan roda 2 untuk operasional Dinas Kominfo	4 unit	
1	25	07	18	02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	12 Jenis	200.000.000	APBD		12 Jenis	200.000.000
1	25	07	18	03	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	12 Jenis	80.000.000	APBD		12 Jenis	80.000.000
1	25	07	18	04	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	6 Jenis	120.000.000	APBD		6 Jenis	120.000.000
1	25	07	18	05	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Sub.bag Umum dan Kepeg	12 Jenis	20.000.000	APBD		12 Jenis	20.000.000
1	25	07	18	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	Sub.bag Umum dan Kepeg	8 Jenis	25.000.000	APBD		8 Jenis	25.000.000
1	25	07	18	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasionnal	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Sub.bag Umum dan Kepeg	7 Unit	40.000.000	APBD		5 Unit	60.000.000
1	25	07	18	08	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Sub.bag Umum dan Kepeg	1 Gedung	15.000.000	APBD		1 Gedung	15.000.000
1	25	07	19		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								

1	25	07	18	01	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi perundang undangan yang terkirim	Sub.bag Umum dan Kepeg	6 orang	50.000.000	APBD		6 orang	70.000.000
1	25	07	20		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	25	07	18	01	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibiayai	Sub.Bag Program & Keu	20 Orang	72.000.000	APBD		20 Orang	72.000.000
1	25	07	18	02	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan SKP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang tersedia	Sub.Bag Program & Keu	12 Dokumen	10.000.000	APBD		12 Dokumen	20.000.000
1					Urusan Wajib								
1	25				Bidang Kominfo								
1	25	07	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
1	25	07	15	01	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perizinan, pengawasan dan pengelolaan Warnet	Diskominfo	1 buah Peraturan Daerah	90.000.000	APBD			90.000.000
1	25	07	15	05	Pengadaan alat Studio dan Komunikasi	Jumlah peralatan Server Website Resmi Kabupaten Dharmasraya beserta sub domainnya.	Diskominfo	Tersedianya perangkat server website resmi Kab. Dharmasraya beserta subdomainnya	75.000.000	APBD			75.000.000
1	25	07	15	08	Lanjutan pembangunan jaringan Antar OPD	Jumlah OPD yang terkoneksi melalui jaringan	Diskominfo	Terkoneksinya 20 OPD se Kab. Dharmasraya	1.400.000.000	APBD	Tahun 2017 sudah terlaksana 15 OPD		1.400.000.000
1	25	07	15	09	Pemeliharaan jaringan Antar OPD	Jumlah OPD yang terkoneksi melalui jaringan	Diskominfo	terpeliharanya Jaringan Internet Antar OPD	100.000.000	APBD			100.000.000
1	25	07	16		Program E-Government								
1	25	07	16	01	Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah Master Plan E-Government	Diskominfo	1 dokumen	300.000.000	APBD			300.000.000
1	25	07	16	02	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi/E-Government	Jumlah aparat pemerintah yang dapat mengoperasikan dan mengelolan website yang nantinya akan dipercaya menjadi web admin website	Diskominfo	60 orang web admin	110.000.000	APBD			100.000.000
1	25	07	17		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi								

1	25	07	17	01	Pemberdayaan Masyarakat Informasi	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Informasi	Kab. Dharmasraya	100 org Masyarakat	80.000.000	APBD			80.000.000
1	25	07	17	02	Sosialisasi dan Pembentukan kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kab. Dharmasraya	6 (enam) KIM	100.000.000	APBD	satu per kecamatan		100.000.000
1	25	07	17	04	Sosialisasi Internet Sehat	Jumlah siswa yang paham akan pemanfaatan internet secara sehat	Diskominfo	150 Orang siswa SMP/SMA	80.000.000	APBD			80.000.000
1	25	07	18		Program Kerjasama Informasi dengan media Massa								
1	25	07	18	'01	Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Prosentasi pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi	Kab. Dharmasraya	Sebaran sarana dan prasarana Telekomunikasi	55.000.000	APBD	Peningkatan Penerimaan retribusi		55.000.000
1	25	7	18	'02	Pengembangan Layanan Media Center	Jumlah Fasilitas Media Center di Kab.Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	Tersedianya 10 perangkat komputer pendukung operasional Media Center Kabupaten Dharmasraya	75.000.000	APBD			100.000.000
1	25	07	19		Program peningkatan Kualitas Layanan Informasi Berbasis TI								
1	25	07	19	01	Pegembangan / peningkatan kemampuan data base sistem informasi	Prosentasi terupdatenya design, module dan konten Website berbasis Database	Diskominfo	Terkelolanya dan terupdatenya 20 berita/bulan kewebsite resmi Kab. Dharmasraya	59.480.000	APBD			59.480.000
1	25	07	19	02	Pembangunan Sistem Informasi Daerah	Jumlah Sistem Informasi OPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya	Diskominfo	5 sistem informasi OPD	575.000.000	APBD			600.000.000
1	25	07	19	03	Pengembangan jaringan dan layanan Media Center	Prosentasi terlayannya kebutuhan wartawan dan masyarakat dalam pemanfaatan Media Center	Diskominfo	Meningkatnya fungsi dan layanan Media Center	50.000.000	APBD			50.000.000
1	25	07	19	04	Pengadaan jaringan WiFi gratis untuk masyarakat	Jumlah hot spot area free WiFi Publik terutama pada daerah yang tidak dilalui kabel Telepon	Kabupaten Dharmasraya	6 titik hot spot area WiFi Gratis untuk masyarakat	90.000.000	APBD			90.000.000
1	25	07	19	06	Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat	Jumlah SMS Pengaduan masyarakat yang dapat dikelola dan ditindak lanjuti	Diskominfo	50 SMS Aduan Masyarakat	21.235.000	APBD			21.235.000
1	25	07	20		Program Pengendalian Jasa usaha POS dan Telekomunikasi								
1	25	07	20	01	Pengendalian tertib usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi	Persentase cakupan upaya bina Jasa Pos dan telekomunikasi	Kab.Dharmasraya	Upaya bina Jasa Pos dan telekomunikasi	55.000.000	APBD	penertiban Jasa usaha Pos dan Telekomunikasi		55.000.000
1	25	07	21		Program Komunikasi Publik								

01	25	07	21	01	Program Monitoring dan Evaluasi KPU-USO	Jumlah Lokasi KPU-USO di Kabupaten Dharmasraya yang di evaluasi dan di monitor	Kab.Dharmasraya	Sebaran sarana dan prasarana evaluasi KPU-USO	100.000.000	APBD			150.000.000
1	25	07	19	02	Sosialisasi dan diseminasi Informasi	Jumlah masyarakat yang menerima informasi penting terkait situasi terkini dan perkembangan pembangunan	Kabupaten Dharmasraya	100 orang masyarakat yang Menerima informasi	60.000.000	APBD			60.000.000
1	25	7	19	03	Pemilihan Media Tradisional Terbaik	Jumlah media tradisional yang di fasilitasi untuk mengikuti lomba media tradisional tingkat provinsi	Kabupaten Dharmasraya		85.000.000	APBD			100.000.000
1	25	7	19	04	Literasi Informasi Media Komunikasi	Terlaksananya Literasi Media Online	Kabupaten Dharmasraya		60.000.000	APBD			60.000.000
1	25	7	19	05	Pekan Informasi Daerah	Jumlah media informasi	Kabupaten Dharmasraya		175.000.000	APBD			190.000.000
1	23				Bidang Statistik								
1	23	07	15		Program Pengembangan Statistik Sektoral								
1	23	07	15	01	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Jumlah Publikasi Statistik Potensi dan Kekhasan Daerah	Kab.Dharmasraya	4 Kec	78.000.000	APBD		11 Kec	143.365.000
1	23	07	15	02	Pengkajian dan Penelitian Komunikasi dan Informatika	Ketersediaan Data Pembangunan Komunikasi dan Informatika	Kab.Dharmasraya	11 Kec	140.000.000	APBD		11 Kec	175.365.000
1	23	07	15	03	Survey Gender dan Anak	Jumlah Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	Kab.Dharmasraya	70%	97.000.000	APBD		100%	117.000.000
1	23	07	15	04	Penyusunan Gini Rasio Daerah	Rasio Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Kab.Dharmasraya	70%	180.000.000	APBD		70%	198.000.000
1	23	07	15	05	Penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Investasi	Persentase Ekonomi Makro Kab. Dharmasraya	Kab.Dharmasraya	100%	105.000.000	APBD		100%	115.500.000
1	23	07	15	06	Penghitungan Nilai Tukar Petani	Persentase Tingkat Kesejahteraan Petani	Kab.Dharmasraya	70%	98.000.000	APBD		70%	107.800.000
1	23	07	15	07	Penyusunan Analisis Tabel Input - Output (IO)	Indeks Hubungan dan Keterkaitan antar sektor ekonomi	Kab.Dharmasraya	100 Buku	157.000.000	APBD		100 Buku	172.700.000
1	23	07	16		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								
1	23	07	16	01	Komplikasi Produk Administrasi Bidang Sosial	Jumlah Publikasi Data Terpilah Gender dan Anak	Seksi Informasi Data Statistik	100 Buku	143.365.000	APBD		100 Buku	157.701.500
1	23	07	16	02	Cetak Buku Saku Statistik Daerah	Jumlah Publikasi Data Bidang Ekonomi	Seksi Informasi Data Statistik	300 eksemplar	98.000.000	APBD		350 eksemplar	123.000.000

1	23	07	16	03	Sosialisasi Statistik Daerah	Jumlah masyarakat yang menerima informasi penting tentang statistik daerah	Seksi Informasi Data Statistik	11 kec	160.250.000	APBD	11 kec	185.700.000
1	23	07	16	04	Sistem Informasi Data Center Daerah	Terlaksananya sistem informasi data daerah	Seksi Informasi Data Statistik	100%	72.000.000	APBD	100%	87.000.000
1	23	07	17		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							
1	23	07	17	05	Belanja Sekretariat PPID	Terlaksananya Operasional PPID	Diskominfo	12 Bulan	200.000.000	APBD	12 Bulan	210.000.000
1	23	07	17	06	Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya	Persentase informasi Publik Yang Disediakan Pemerintah Daerah	Diskominfo	100%	300.000.000	APBD	100%	320.000.000
1	23	07	17	07	Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya	Persentase Penduduk Yang Terpapar Informasi Publik Pemerintah Daerah	Diskominfo	100%	150.000.000	APBD	100%	170.000.000
1	21				Bidang Persandian							
1	21	07	02		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							
1	21	07	02	01	Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah	Jumlah aturan / SOP tentang persandian daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 Perbup dan 1 SOP	150.000.000	APBD	1 Perbup	100.000.000
1	21	07	02	02	Pengelolaan peralatan sandi dan jaring komunikasi sandi yang digunakan pemerintah daerah	Jumlah peralatan sandi yang di kelola	Kabupaten Dharmasraya	10 Unit	350.000.000	APBD	10 Unit	350.000.000
1	21	07	02	03	Penyediaan alat pendukung utama persandian yang digunakan pemerintah daerah	Jumlah peralatan pendukung sandi tersedia	Kabupaten Dharmasraya	6 Unit	230.000.000	APBD	4 Unit	120.000.000
1	21	07	02	04	Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian pada setiap perangkat daerah	Jumlah media informasi yang terkelola	Kabupaten Dharmasraya	1 Unit	175.000.000	APBD	1 Unit	175.000.000
1	21	07	02	05	Koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah koordinasi persandian yang terlaksana	Kabupaten Dharmasraya	4 kali	150.000.000	APBD	4 Kali	150.000.000

1	21	07	02	06	Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan persandiaan untuk pengamanan informasi	Jumlah sandimen terlatih	Kabupaten Dharmasraya	4 Orang	200.000.000	APBD	4 Orang	200.000.000
1	21	07	02	07	Pengembangan sistem pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah	Jumlah perangkat pengamanan Informasi milik daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 Unit	200.000.000	APBD	1 Unit	200.000.000
1	21	07	02	08	Penyediaan Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 Unit	75.000.000	APBD	0	0
1	21	07	02	09	Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka milik pemerintah dab yang dikecualikan milik pemerintah	Jumlah sarana informasi terbuka milik pemerintah terkelola dan yang terkecualikan oleh pemerintah daerah terkelola	Kabupaten Dharmasraya	2 Unit	200.000.000	APBD	2 Unit	200.000.000
Jumlah									8.359.325.000			9.217.041.500

Sikabau, April 2017

KEPALA DINAS,

H. ST. M. TAUFIK, SE, MM.
NIP. 19640815 198911 1 001

